



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DD DDD



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dan juga sebagai bentuk komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKj-IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Timur



H. M. Yadi Robyan Noor, S.E., M.TP.

Pembina Utama

NIP. 196207211988111001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja yang digantikan dengan Petunjuk Teknis Penyusunan LKj-IP Berdasarkan Pemenpan No 53 Tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dibuat sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga kepada pihak-pihak yang memberi mandat / amanah terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk memberikan gambaran umum pertanggungjawaban kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- Dalam penyusunan Perencanaan Strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 sesuai perubahan RPJMD memiliki tujuan (1) Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara, (2) Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara dan (3) Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara.

- 2) Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan Non Batubara.
 - 3) Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.
 - 4) Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.
- Ditinjau dari pencapaian sasaran strategis dapat dikategorikan sangat berhasil, dimana dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan, 2 (dua) diantaranya dengan 4 (empat) indikator mencapai diatas 100 (seratus) persen dan 1 (satu) diantaranya indikator mencapai diatas 90 (sembilan puluh) persen dan 1 (satu) diantaranya indikator mencapai di atas 60 (enam puluh) persen.
 - Evaluasi Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana tingkat capaian sasaran dengan realisasi / capaian kinerja, sehingga secara keseluruhan didapatkan hasil 136,32 persen.

Demikian LKj-IP ini dibuat, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
a. Dasar Pembentukan Organisasi	1
b. Tugas Pokok Dan Fungsi	2
c. Struktur Organisasi	3
d. Sumber Daya Manusia	6
e. Aspek Strategis Organisasi	7
f. Permasalahan Utama (Isu Strategis) Tahun 2021	8
g. Sarana dan Prasarana Kerja	23
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
a. Perencanaan Strategis	24
b. Indikator Kinerja Utama	28
c. Perjanjian Kinerja	30
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
a. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	33
b. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	37
c. Analisis Capaian Kinerja	41
d. Realisasi Anggaran	60
BAB IV. PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

B. TUGAS DAN FUNGSI.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas dan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- c) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;



- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- h) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai :

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;

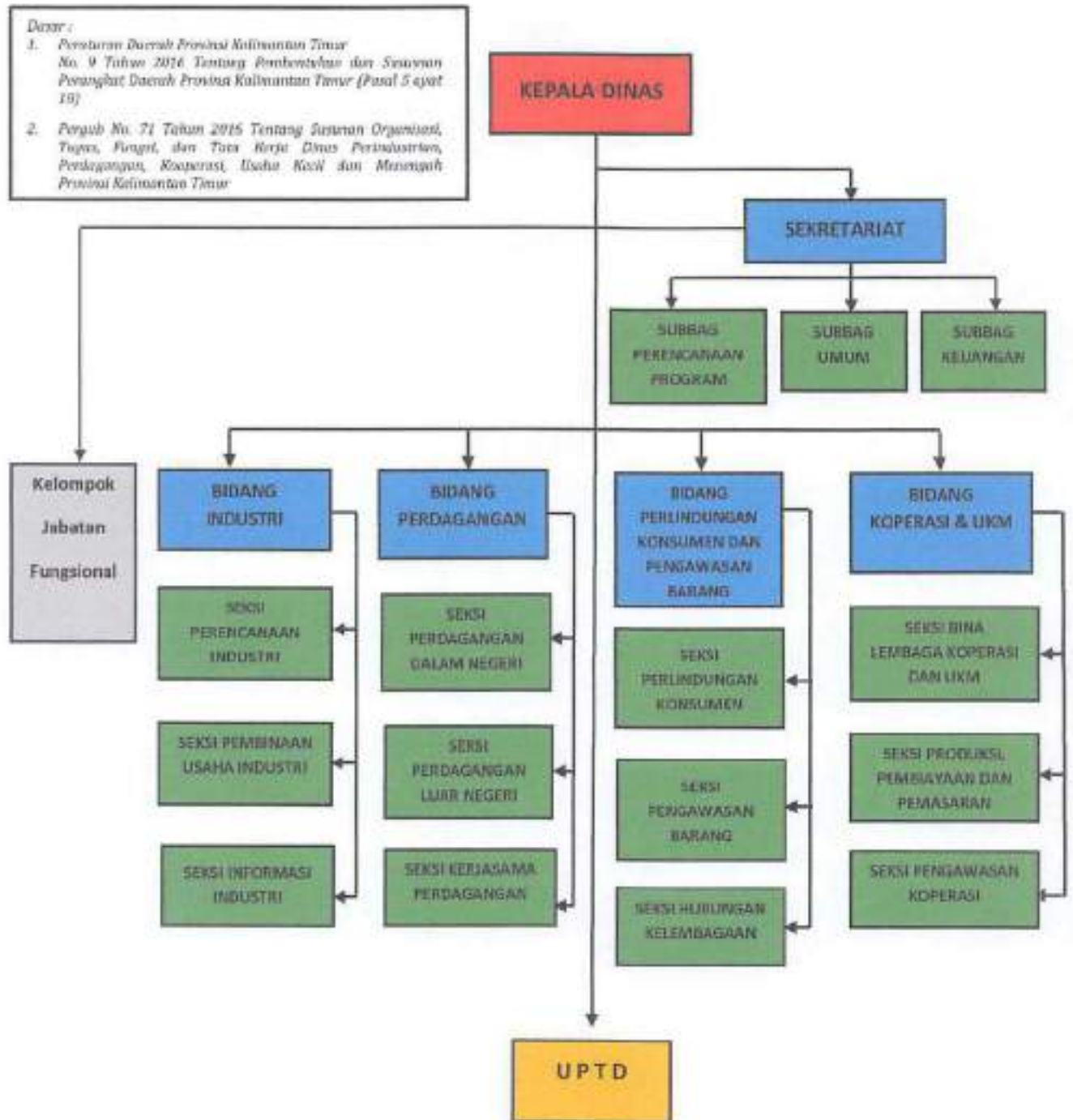


- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang industri;
- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- g) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- h) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

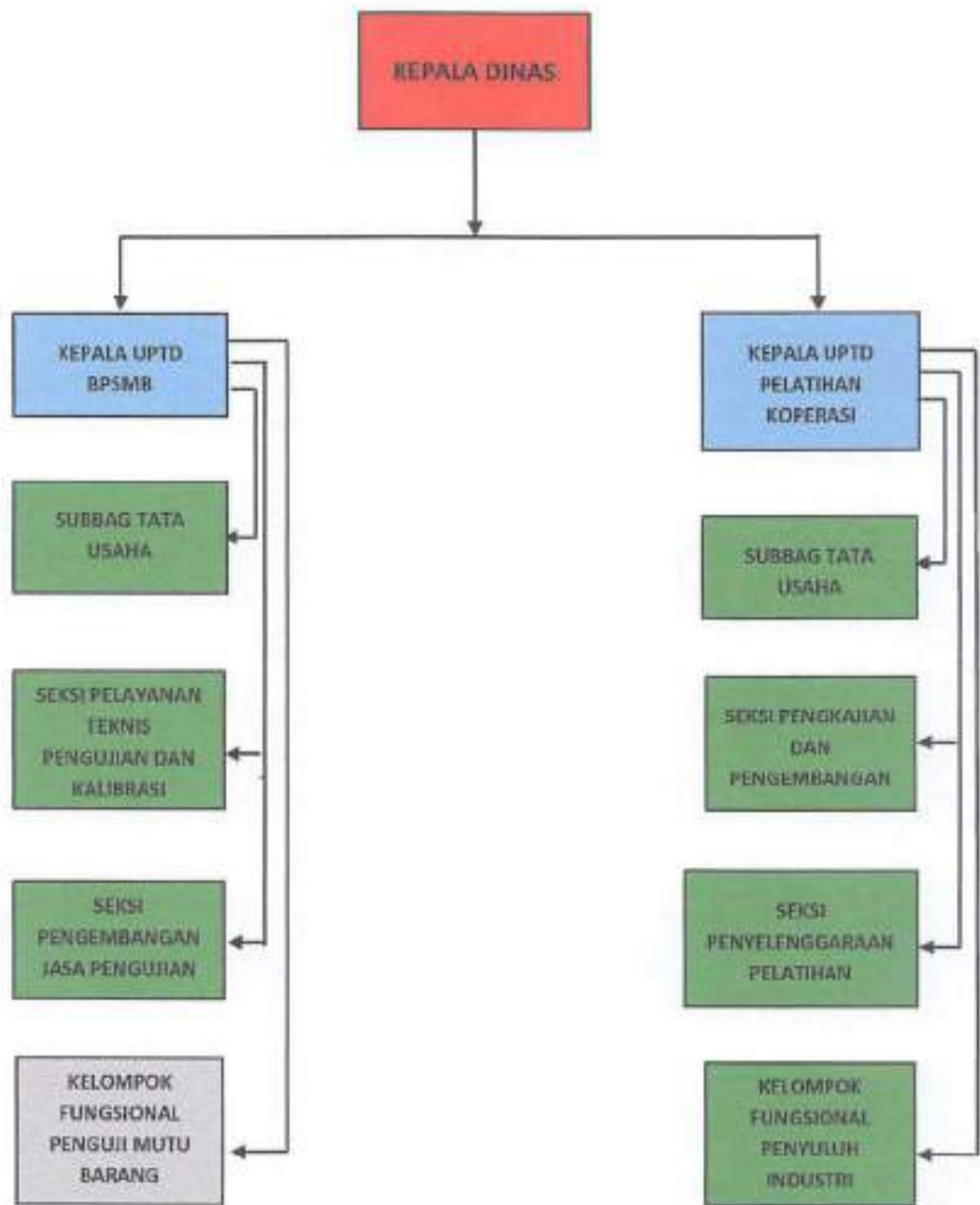
C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas



Bagan 2. Struktur Organisasi UPTD



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2021, memiliki jumlah pegawai 76 orang yang dirasa masih banyak memerlukan tambahan pegawai, dikarenakan banyaknya pegawai yang purna tugas. Rincian keadaan pegawai sebagaimana dalam tabel 1.1.

Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari tingkat pendidikan serta pelatihan teknis maka kualitas SDM tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, hal ini terlihat bahwa 12,00% berpendidikan S2 dan 42,00% SDM aparat Indagkop berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 11,00% dan 31,00% berpendidikan SLTA, dengan golongan ruang/pangkat 74,00% adalah Penata dan 13,00% adalah Pembina sedangkan sisanya 13,00% Pengatur.

Tabel 1.1 Keadaan Umum Pegawai Disperindagkop & UKM Prov. Kaltim Per 31 Desember 2021

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Pria	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Pasca Sarjana
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	10	7	-	4	12	1	-	1	5	3	6	2
Bid. Industri	6	4	-	-	8	2	-	-	2	-	5	3
Bid. PKPB	3	6	-	1	8	0	-	-	1	1	7	-
Bid. Perdagangan	3	5	-	-	6	2	-	-	3	1	2	2
Bid. Koperasi	5	1	-	-	5	1	-	-	2	1	3	-
UPTD BPSMB	9	8	1	2	13	1	1	-	4	4	7	1
UPTD Pelkop	7	2	-	3	4	2	-	-	4	-	4	1

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. **Adaptasi atas perubahan lingkungan strategis.**

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategis, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. **Pengelolaan keberhasilan.**

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. **Orientasi ke masa depan.**

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah pengetahuan/masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

4. **Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu.**

Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. **Pelayanan prima.**

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) TAHUN 2021.

1. Sektor Industri

Pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Timur disesuaikan dengan kondisi potensi daerah serta aspirasi masyarakat, dengan demikian diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal, sehingga pemerataan kesejahteraan dapat terwujud.

Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah yang sangat luas juga memiliki sumber daya alam *renewable* yang melimpah dan sangat potensial untuk dikembangkan serta dilakukan hilirisasi industrinya diantaranya :

Perkembangan Luas (ha) dan Produksi (ton) Perkebunan Kalimantan Timur, 2018-2020

Komoditi	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Karet			
Luas	115.082	118.638	123.460
Produksi	57.569	52.817	55.690
Kelapa Sawit*)			
Luas	1.199.407	1.227.665	1.374.543
Produksi	13.398.363	18.343.852	17.721.970

*) Satuan dalam TBS, bukan CPO

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Rumah Tangga Perikanan Kalimantan Timur, 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Perikanan Tangkap (Ton)	149.039	147.036,5	152.481,3
Perikanan Budidaya (Ton)	151.918.325	143.511.943	160.243.592
Jumlah (Ton)	152.067.364	143.658.980,5	160.396.073,3

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Produksi Pertambangan di Kalimantan Timur, 2018-2020

Produksi	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Minyak Bumi (Ribu Barell)	23.717,95	20.829,80	14.381,23
Gas Bumi (Ribu MMBTU)	296.832,49	240.828,16	156.294,54
Batubara (Ribu Ton)	257.143,93	228.979,57	1.878.017,25

*) data PDRB ADHB Pertambangan batubara dan lignit

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

PDRB disumbang sebagian besar dari komoditas batu bara sekiranya apabila sumbangan komoditi ini berkurang akan berdampak pada ekonomi Kalimantan Timur, sehingga harus mencari dan mengembangkan sektor-sektor lain yang lebih riil dalam menopang perekonomian Kalimantan Timur. Banyak potensi yang dimiliki yang belum tergarap secara maksimal yakni pertanian, perkebunan, perikanan, laut, pariwisata, produk kerajinan tradisional, UMKM, dan industri lainnya.

Oleh karena itu dilakukan terobosan pembangunan melalui proses peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi industri dan peningkatan produktifitas aset daerah. Ketergantungan ekonomi terhadap sektor batu bara dan bahan galian sudah tidak dapat

dilandakan lagi. Salah satu pilihan transformasi ekonomi Kaltim adalah melakukan pengolahan sumber daya alam lokal menjadi produk olahan (hilirisasi) dan pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan usaha-usaha untuk mendorong transformasi tersebut dengan salah satunya adalah membangun kawasan strategis provinsi, dimana kawasan ini dapat menjadi poin-poin untuk melakukan pertumbuhan ekonomi yang baru berdasarkan industri pengolahan sumber daya alam lokal terbarukan.

Namun, proses transformasi ini dinilai masih lambat karena permasalahan yang kompleks yakni dari koordinasi tingkat pemerintahan antar kelembagaan atau instansi, perizinan hingga adanya resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan diperparah dengan adanya pandemi Covid-19.

Sektor industri berbasis komoditi unggulan di Kalimantan Timur sampai hari ini belum memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kondisi demikian dikarenakan sektor industri masih belum optimal, baik dalam hal teknologi, ketersediaan lahan, jaminan ketersediaan bahan baku, infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia lokal untuk bersaing dengan tenaga kerja luar.

Pembangunan industri berbasis komoditi unggulan yang akan menghasilkan produk unggulan di Provinsi Kalimantan Timur harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal serta pemerataan kesejahteraan akan terwujud. Permasalahan pembangunan industri provinsi menjadi salah satu rujukan penting dalam merumuskan program prioritas pembangunan industri di provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur, terdapat lima permasalahan utama pembangunan industri di Kalimantan Timur, yaitu :

- 1) Belum memadainya infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk konektivitas antar wilayah.
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia industri.
- 3) Rendahnya komitmen dan respon stake holder dalam bekerjasama untuk menyelesaikan masalah.
- 4) Sulitnya mendapatkan lahan yang sesuai kebutuhan industri dan harga yang masih relatif tinggi.
- 5) Kelembagaan belum efektif.

2. Sektor Perdagangan.

Sektor perdagangan Kalimantan Timur tahun 2021 terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain:

a. Terbatasnya Ekspor Komoditi dan Produk Non Migas Non Batubara.

Sejalan dengan visi misi Gubernur Kalimantan Timur khususnya misi ke-2, yaitu "Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan", dengan artian bahwa perlu dilakukan upaya strategis dalam percepatan pencapaian pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim yang dibalut dalam kedaulatan wilayahnya. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merubah struktur PDRB dari komoditi primer berbasis migas dan batubara menjadi komoditi non migas dan non batubara, dipandang sebagai upaya strategis untuk percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mempersilapkan komoditi non migas non batubara yang menjadi unggulan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Beberapa potensi pengembangan komoditi di Kalimantan Timur antara lain komoditi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan ekonomi kreatif. Akan tetapi potensi tersebut belum dikembangkan dan dikelola secara optimal dan masih diperdagangkan dalam bentuk

mentah (raw material). Komoditi-komoditi tersebut diperdagangkan antar pulau dan bahkan ada sebagian yang ekspornya melalui daerah di luar Kaltim. Sehingga nilai tambah dan margin keuntungan dalam bentuk olahan atau diversifikasi produk turunannya, hanya dinikmati oleh para pelaku usaha di luar Kaltim. Untuk itu, pengembangan komoditi menjadi produk olahan melalui peningkatan industrialisasi/hilirisasi komoditi menjadi hal yang prioritas untuk dilakukan di Kaltim. Kegiatan hilirisasi industry ini diharapkan pro poor, pro job dan pro growth dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pembangunan kawasan-kawasan industri, peningkatan SDM tenaga kerja lokal, pengelolaan sumber bahan baku yang berkelanjutan dan lain-lain.

b. Rendahnya Daya Saing Produk Yang Dipasarkan.

Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini mendorong persaingan semakin ketat. Berbagai negara terus berupaya meningkatkan daya saing produknya agar produk-produknya lebih efisien dan laku di pasaran. Untuk meningkatkan daya saing ditempuh beberapa langkah baik peningkatan efisiensi, menekan biaya produksi, perbaikan iklim usaha, perbaikan infrastruktur serta mengurangi berbagai bentuk pungutan.

Kurang kondusifnya lingkungan usaha juga memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing produk ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dirasakan masih menjadi tugas Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program di semua sektor untuk bersama-sama bersinergi mendorong penciptaan komoditi unggulan Kaltim yang berdaya saing.

c. Belum Optimalnya Pemanfaatan Peluang Ekspor Langsung Di Kalimantan Timur.

Beberapa fasilitas infrastruktur yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di antaranya adalah penyiapan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai pelabuhan ekspor langsung. Akan tetapi fasilitas ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh eksportir untuk mengekspor komoditinya secara langsung dari Pelabuhan Teluk Balikpapan ke negara tujuan ekspor. Belum semua pelaku eksportir komoditi potensial menggunakan ekspor langsung, masih banyak eksportir yang mengirimkan komoditinya ke luar daerah dan baru melakukan ekspornya melalui pelabuhan ekspor di luar daerah tersebut. Sehingga Kalimantan Timur kehilangan potensi pendapatan daerah dari pajak ekspor. Hal ini diakibatkan dari belum adanya regulasi yang mendorong atau mewajibkan untuk komoditi asal Kaltim yang diekspor harus memanfaatkan fasilitas ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan.

Peran aktif Pemerintah Kabupaten Kota juga sangat menentukan bagi keberhasilan kebijakan ekspor langsung ini. Dimana Pemerintah Kabupaten Kota belum semua memberikan dukungan dalam memanfaatkan Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan ekspor komoditi langsung.

Pelabuhan Teluk Balikpapan selain dikembangkan sebagai Pelabuhan Ekspor Langsung, juga mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai pelabuhan penghubung (hub) akses komoditi dari antar pulau/provinsi potensial ke Pelabuhan Teluk Balikpapan. Beberapa daerah yang berpotensi menjadi konektivitas dengan Pelabuhan Teluk Balikpapan adalah Sulawesi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan lain-lain. Saat ini konektivitas tersebut masih sangat terbatas karena belum adanya kebijakan dan regulasi terkait pemanfaatan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai hub komoditi antar daerah.

Belum berkembangnya mitra baru untuk meningkatkan pelayaran ekspor langsung juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini disebabkan beberapa perusahaan pelayaran harus memperhitungkan biaya untuk sekali kirim ekspor dan untuk kembalinya harus ada komoditi yang diangkut (jangan sampai kosong). Sehingga perusahaan pelayaran yang melayani ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan masih terbatas.

Belum berkembangnya jasa pelayanan penunjang kelancaran distribusi peti kemas di kawasan Teluk Balikpapan seperti sarana infrastruktur jalan, SPBU dan lain-lain masih terbatas. Misalnya saja akses jalan dari Samarinda menuju Pelabuhan Teluk Balikpapan masih rawan dan kurang memadai. Sehingga program pembangunan infrastruktur Samarinda Balikpapan perlu mendapatkan perhatian agar mobilitasi kontainer dari Samarinda dapat dilaksanakan lancar menuju Teluk Balikpapan.

d. Terbatasnya Jangkauan Pemasaran Komoditi dan Produk Ekspor.

Pemasaran komoditi ekspor Kaltim tentu tidak terlepas dari upaya promosi dan publikasi. Selain itu Pemanfaatan Informasi dan Teknologi yang masih terbatas untuk mendorong produk UKM potensial ekspor juga masih menjadi kendala sehingga pemasaran produk UKM kebanyakan masih lokal. Terbatasnya promosi dalam dan luar negeri melalui kurasal dan pendampingan belum banyak dikembangkan sehingga even promosi masih terkesan kurang tepat sasaran dan kurang optimal pemanfaatannya.

e. Terbatasnya Produksi dan Sarana Distribusi Bahan Pokok.

Kebutuhan pokok masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan strategis bagi sebuah Negara. Ketersediaan barang kebutuhan pokok yang harganya tinggi dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, dan berbagai gejolak sosial.

Dalam memenuhi bahan kebutuhan pokok masyarakat Kalimantan Timur, sebagian besar barang kebutuhan pokok tersebut masih di datangkan dari luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi. Tingginya ketergantungan distribusi barang kebutuhan pokok tersebut menyebabkan disparitas harga dan memerlukan efisiensi perdagangan melalui kelancaran arus distribusi. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menjaga kondisi kebutuhan pokok dan barang penting ini dalam 3 (tiga) hal, antara lain *ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga* terutama menjelang Hari Besar Keagamaan dimana barang kebutuhan pokok selalu mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dukungan sektor terkait juga dirasakan masih kurang khususnya terkait optimalisasi dan juga peningkatan teknologi budidaya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dalam daerah di Kaltim dalam mewujudkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan pengendalian harga.

f. Belum Optimalnya Fasilitasi Sistem Distribusi Perdagangan.

Rantai Distribusi yang panjang menjadi penyebab tingginya harga komoditi kebutuhan pokok karena belum optimalnya fasilitasi distribusi perdagangan. Hal ini terjadi karena panjangnya rantai distribusi dari hulu (produsen) hingga hilir (konsumen) yang melalui lebih dari 5 (lima) titik yaitu dari produsen – pengepul – agen – pedagang besar – pengecer – konsumen, hal ini menyebabkan perdagangan tidak efektif dan efisien. Selain panjangnya rantai distribusi, kita merasa kesulitan untuk memantau perdagangan yang berada di daerah perbatasan hal ini disebabkan tidak adanya sistem yang mengatur perdagangan antar provinsi. Data ketersediaan atau stok komoditas belum optimal. Banyak Distributor, Sub Distributor dan Agen yang belum melakukan kewajiban daftar, sehingga data ketersediaan stok bahan pokok masih terbatas.

g. Belum Optimalnya Kerjasama Perdagangan.

Belum berkembangnya kemitraan dan Kerjasama antar daerah dalam peningkatan neraca perdagangan antar pulau dan pemenuhan bahan pokok. Masih terbatasnya jenis dan jumlah komoditi yang dikerjasamakan perdagangannya juga perlu mendapatkan perhatian bagaimana ke depannya untuk bisa melakukan identifikasi potensi komoditi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi komoditi perdagangan antar pulau sehingga mampu menjadi peluang pasar bagi produk Kaltim misalnya handycraft, hasil perikanan, hasil perkebunan dan lain-lain. Selain itu kerjasama perdagangan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim juga belum optimal dilaksanakan.

h. Konsumen Kalimantan Timur Pada Umumnya Masih Pada Tahap Mampu Belum Kritis.

Masih banyak masyarakat Kaltim yang belum mengetahui dan paham adanya undang-undang perlindungan konsumen dan lembaga perlindungan konsumen. Sehingga apabila dilapangan ada persoalan, belum bisa malakukan penyelesaian dengan benar sesuai aturan. Indeks Keberdayaan Konsumen di definisikan sebagai keadaan subjektif konsumen yang terampil, tahu undang-undang dan Lembaga Perlindungan Konsumen, aktif mencari informasi serta menegaskan hanya dengan mengajukan komplain.

i. Belum Adanya Peran Aktif Masyarakat Menggunakan Hak dan Kewajiban Sebagai Konsumen.

Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Kalimantan Timur tahun 2020 adalah 51,30 (IKK : 40,1 – 60,00 ; Mampu), yang berarti konsumen kaltim sudah tahu keberadaan undang-undang perlindungan konsumen No. 81 tahun 1999, sudah menggunakan hak dan kewajibannya untuk mencari informasi dan menentukan pilihan terbaik serta menggunakan produk dalam negeri bagi diri sendiri dan

lingkungannya. Tetapi konsumen kaitim belum pada taraf kritis (IKK : 60,1 – 80,0 ; Kritis), yaitu berperan aktif memperjuangkan hak bila merasa dirugikan dan melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen yang cerdas serta mengutamakan produk dalam negeri di dalam kebudayaan sehari-hari. Kebudayaan konsumen dapat diwujudkan melalui 2 (dua) cara yaitu perlindungan konsumen dan pendidikan konsumen.

j. Pelaku Usaha Masih Ada Yang Belum Patuh.

Dari hasil pengawasan dalam rangka melindungi konsumen dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa yang berasal dari kabuapten/kota se Kalimantan Timur, ditemukan masih ada pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Esensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada hakikatnya memberikan aturan main kepada palaku usaha agar melakukan aktifitas usahanya secara profesional, jujur, beretika bisnis, tertib mutu, tertib ukur yang memenuhi persyaratan perlindungan konsumen, dimana barang yang diproduksi dan diperdagangkan aman untuk digunakan oleh konsumen.

k. Belum Optimal Pemanfaatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Kalimantan Timur.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bab XI pasal yang menyatakan bahwa pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.

Pada saat ini di Provinsi Kalimantan Timur, badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah terbentuk di Kota Samarinda dan Kabupaten Berau.

Tahun 2020 BPSK Kota Samarinda hanya menerima 9 (sembilan) pengaduan konsumen dan 5 (lima) saksi ahli. Sedangkan BPSK Kabupaten Berau tidak ada pengaduan , sehingga anggota BPSK

Kabupaten Berau melakukan pengawasan bersama Dinas Perdagangan setempat.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, konsumen belum optimal memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

l. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia PNS UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang.

Sumber Daya Manusia PNS UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang baik tenaga teknis laboratoris (Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang) maupun tenaga administratif (Pelaksana) belum sesuai dibandingkan beban kerja yang ada. Sehingga untuk mengatasinya perlu dilakukan :

- 1) Perekrutan Tenaga Non PNS baik sebagai tenaga teknis maupun tenaga non teknis.
- 2) Analisis Beban Kerja untuk mengusulkan tenaga CPNS agar beban kerja yang ada dapat dilaksanakan oleh SDM PNS sesuai tugas dan fungsinya.

n. Belum Optimalnya Pemanfaatan Komite Akreditasi Nasional (KAN) Dalam Pelayanan Pengujian Dan Kalibrasi.

1) Pelayanan Pengujian.

Ruang lingkup pengujian yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelanggan dikarenakan :

- Ruang lingkup yang telah diakreditasi terhadap Laboratorium Pengujian seperti komoditi Lada Putih dan Biji Kakao langsung dijual antar pulau oleh pelaku usaha tanpa memperhatikan mutu komoditi.

Informasi ini didapatkan berdasarkan hasil identifikasi potensi layanan pengujian di sentra Komoditi Lada Putih dan Biji Kakao di kabupaten Kukar, Kutim dan PPU.

Mou pemerintah

- Pelaku Usaha produk Crude Palm Oil (CPO) menginginkan UPTD BPSMB dapat memberikan pelayanan bukan hanya sebagai laboratorium pengujian tetapi dapat sebagai Lembaga Surveyor, Informasi ini didapatkan berdasarkan hasil Pertemuan Teknis yang diprakarsai oleh UPTD BPSMB Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur bersama instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa Pelaku Usaha CPO yang dilaksanakan di Samarinda tahun 2018.
- Mengembangkan ruang lingkup pengujian lain dan akreditasinya yang disesuaikan dengan permintaan potensi pasar antara lain : Beras dan Minyak Goreng.

2) Pelayanan Kalibrasi.

Ada beberapa ruang lingkup dan kapasitas yang belum dikembangkan akreditasinya sesuai permintaan pelanggan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan baik pemerintah maupun swasta diperlukan akreditasi terhadap ruang lingkup anatara lain : Thermohyrometer, Tekanan, Gaya dan Aliran.

4. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

a. Rendahnya Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi.

- Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan agenda wajib dilakukan oleh Koperasi. Pelaksanaan RAT dilakukan paling sedikit 1 kali dalam satu tahun buku. RAT paling lambat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tutup buku. Namun dengan adanya Pandemi Covid – 19 saat ini telah menghambat pelaksanaan RAT, terkendala Peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan tidak dibolehkan mengundang orang banyak. Padahal solusi RAT Koperasi masih mungkin dilaksanakan dan sudah diatur oleh Pemerintah.

- Masih banyak Koperasi yang belum mengetahui peraturan tentang RAT dapat dilaksanakan melalui media teleconference atau media elektronik lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil Menengah Nomor: 19/PER/M.KUKM/IX/2015.

b. Kurangnya Pemahaman Para Pengurus Koperasi Mengenai Pelaporan Pertanggung Jawaban Koperasi.

Pengurus adalah pemegang amanat anggota untuk menjalankan roda organisasi dan perusahaan koperasi. Dengan berpedoman pada keputusan-keputusan rapat anggota, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Undang – undang perkoperasian dan peraturan – peraturan yang berlaku di lingkungan koperasi. Dalam pelaksanaannya, pengurus dalam menjalankan tugas perkoperasian masih belum patuh dan taat terhadap peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan adanya konflik antara pengurus dengan anggota.

c. Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap UKM.

Semenjak Covid – 19 ditetapkan berstatus pandemi, memberikan dampak yang besar terhadap keberlangsungan sektor ekonomi domestik dan global. Dampak pandemi paling terasa terjadi pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dampak keberlangsungan terhadap UMKM dapat dilihat dari indikator turunnya omset penjualan, sulitnya mendapatkan modal, sulit mengakses bahan baku produksi.

UMKM berperan sebagai roda penggerak roda ekonomi yang sangat cepat. Secara mikro ekonomi, keberadaan UMKM sangat fluktuatif, hal ini dapat terjadi karena pergeseran sektor usaha guna mengikuti pangsa pasar yang ada atau karena memiliki struktur permodalan yang belum mapan. Kondisi tersebut menjadikan posisi UMKM sangat sulit untuk mandiri, untuk itu diperlukan secara terus menerus pendataan UMKM by name by address.

Berbagai keterbatasan yang dihadapi UMKM dalam menghadapi dampak pandemi Covid – 19, maka perkembangan dan pembinaan UMKM lebih diarahkan untuk mengakses pasar secara online dengan meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, nasional dan internasional.

VI SI : Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat			
Misi II : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkesdian.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN
1. Meningkatkan kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Non Batubara	1. Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara.	Pengembangan Industri Unggulan Provinsi	Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi
			Pengembangan industri hulu agro, aneka, dan pangan
			Pengembangan sumber daya manusia pelaku UKM
2. Meningkatkan Nilai Ekspor Non Migas dan non Batubara	2. Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas	Peningkatan Daya Saing Komoditas Non Migas dan Batubara Di Pasar Internasional	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah
		Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri	Peningkatan ekspor komoditi dan produk non migas dan batubara diarahkan kepada peningkatan daya saing, optimasi peran Direct Call dan Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor;
		Peningkatan Sistem Distribusi Yang Efisien	Pengendalian inflasi dan stabilisasi kebutuhan barang pokok penting dilakukan melalui Pengembangan akses dan logistic penerapan harga acuan, penataan perdagangan

VI SI : "Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat"

Misi II : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan penetrasi pasar, koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan kebutuhan bahan pokok penting
	3. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.	Menurunnya Peredaran Barang dan/ atau Jasa Yang Tidak Sesuai Ketentuan	<p>Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan barang diarahkan pada perlindungan hak konsumen</p> <p>Pengembangan cinta produk Indonesia diarahkan pada peningkatan kesadaran konsumen, pelaku usaha, komunitas dan generasi muda serta penerapan pelaksanaan aturan dan pengawasan, dengan melibatkan semua pihak terkait, BPSK dan LPKSM serta masyarakat luas;</p>
3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	4. Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	<p>Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM</p> <p>Pengembangan platform pasar koperasi dan UKM berbasis digital</p> <p>Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM</p> <p>Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM</p> <p>Peningkatan SDM Koperasi dan UKM</p>

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Peningkatan Sarana Prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Tanah	60.755	m ²
2	Bangunan Gedung	10.890	m ²
3	Listrik	5	Jaringan
4	Air	5	Jaringan
5	Telepon	7	Line (1 fax)
6	Area Parkir	3	Area
7	Ruang Rapat	3	Ruang
8	Ruang Arsip	3	Ruang
9	Koperasi	1	Buah
10	Taman	2	Area

Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagai langkah-langkah untuk mencapai visi dan misi Kalimantan Timur 2019-2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara terus menerus melakukan inovasi-inovasi baru untuk menciptakan peluang dalam peningkatan di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan dan sasaran disertai dengan indikator pengukurannya yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan menetapkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan strategis dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun, tujuan, sasaran beserta indikator kinerjanya, serta program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi pula dengan target tahunannya disampaikan pada tabel terlampir:

Tabel 2.1. Target Kinerja Sasaran Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2021	Target Sasaran Kinerja tahun			
						2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara terhadap PDRB (%)	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Persen	2,09	-	3,38	4,17	4,51
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kalim	Persen	20,03	-	17,55	18,25	18,97
		Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen,	Disparitas harga antar wilayah (%)	Persen	11,52	20	18	18	17
			Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	52,57	33	54	53	54
Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	Milyar (Rp)	1.100	-	924	1.018	1.118
			Nilai Omzet UKM	Tirium (Rp)	78,6	-	50	52	54

Tabel 2.2 Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Persen	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
2.	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan non Batubara	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim	Persen	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota
			Disparitas harga antar wilayah (%)	Persen	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	
		Peningkatan Indeks Keberdayaan	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	Program Standarisasi dan Perlindungan	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.2 Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
	1	3	4	5	6	7
		Konsumen.			Konsumen	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	Milyar (Rp)	Program Kesehatan Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			Nilai Omzet UKM	Tribun (Rp)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usah Kecil Yang Dilakukan Melalui Pedataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
					Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam pengukuran kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategik, adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2019-2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara	1. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Berdasarkan laporan dinas dan perhitungan BPS	Berdasarkan data BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara	2. Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim	BPS dan Bank Indonesia	Berdasarkan data BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
		3. Disparitas Harga Antar Wilayah	Harga di Provinsi / Harga Kab / Kota	Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
3	Peningkatan indeks Keberdayaan Konsumen	4. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Survey Keberdayaan Konsumen Kalimantan Timur	Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	5 Nilai Omzet Koperasi	Berdasarkan laporan data pemeringkatan, penilaian kesehatan dan RAT Koperasi	Data ODS	Kepala Dinas
		6 Nilai Omzet UKM	Berdasarkan laporan data pemeringkatan, penilaian kesehatan.	Data ODS	Kepala Dinas

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Persen	3,38
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim	Persen	17,55
		Disparitas Harga Antar Wilayah	Persen	18
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	54
4	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	Milyar	924
		Nilai Omzet UKM	Triliun	50

1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 terjadi perubahan struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merubah semula Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 55.887.255.626,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 51.432.079.126,- dan Belanja Modal Rp 4.455.176.500,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 45.805.402.760,- (81,96%) dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp 41.991.790.260,- (81,65%) dan Belanja Modal Rp. 3.813.612.500,- (85,60%).

2. Target Belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	51,432,079,126	41,991,790,260	81,65
	Belanja Pegawai	19,020,588,094	15,697,332,218	82,53
	Belanja Barang dan Jasa	32,411,491,032	26,294,458,042	81,13
2.	Belanja Modal	4,455,176,500	3,813,612,500	85,60
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,954,176,500	2,826,703,500	95,68
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,501,000,000	986,909,000	65,75

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Operasi Tahun 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Presentase	Keterangan
1	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.600.000.000	10,02 %	
2	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas Dan Non Batubara	2.800.000.000	5,01%	
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	2.750.000.000	4,92 %	
4	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	7.002.477.518	12,53 %	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	2	3	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,14	23,83
2	Pengukuran Kinerja	25%	18,44	20,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,97	10,97
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,12	5,25
5	Capaian Kinerja Organisasi	20%	12,13	10,02
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	70,79	70,06
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Tabel 3.2 Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
1.	Perencanaan Kinerja		
a.	Agar tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra lebih ditingkatkan lagi sehingga merupakan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dalam RPJMD dan indikator serta target yang ditetapkan dalam Renstra menjadi	Melakukan Review Renstra di tahun 2021 (tahun ke 2 Renstra) untuk diselaraskan dengan RPJMD yang juga dilakukan Review. Hal ini Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8	Rapat dalam rangka Review Renstra telah dilaksanakan tahun 2021 sebagaimana dianggarkan dalam DPA. Tahun 2022 telah tersusun Renstra Perubahan Tahun 2022 – 2023 selaras dengan RPJMD Perubahan 2022 – 2023.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD;	tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	
	b. Lebih ditingkatkan lagi sehingga dokumen renstra harus mengacu/selaras dengan tugas dan fungsi, dan menggambarkan core business perangkat daerah	Melakukan Perubahan Renstra yang diharapkan terjadi peningkatan dan perbaikan sesuai dengan tupoksi dan core bisnis.	Melaksanakan Rapat dalam rangka Review Renstra dan telah dilaksanakan tahun 2021 sebagaimana dianggarkan dalam DPA. Tahun 2022 telah tersusun Renstra Perubahan Tahun 2022 – 2023. Diharapkan telah selaras dengan tupoksi dan core bisnis.
	c. Target jangka menengah dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dan dokumen Renstra direviu secara berkala;	Menganggarkan kegiatan monitoring pencapaian kinerja jangka menengah sampai dengan tahun berjalan dan review renstra secara berkala.	Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Rapat evaluasi renja dan Renstra serta Review Renstra dengan output laporan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dianggarkan dalam DPA dalam tahun 2022.
	d. Rencana Aksi atas Kinerja agar dimonitor pencapaiannya secara berkala serta Rencana Aksi dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan.	Memonitor rencana aksi atas capaian kinerja.	Melaksanakan monitoring atas rencana aksi dan capaian kinerja per triwulan serta rapat evaluasi dan monitoring per semester.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
2.	Pengukuran Kinerja		
	<p>a. Hasil Pengukuran capaian kinerja mulai dari tingkat eselon IV keatas dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment baik kepada pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja, yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target, yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai) dan dengan capaian diatas standar dengan yang standar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berupaya melakukan perbaikan terkait kualitas pengukuran maupun terhadap kehandalan data kinerja. - Diberikan penghargaan kepada aparat yang berprestasi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi lebih intens dengan bidang dan UPTD terkait pengukuran capaian kinerja serta ketepatan dan kehandalan data capaian kinerja. - Melakukan monitoring secara langsung kegiatan yang berdampak kepada pengukuran capaian kinerja.
3.	Pelaporan Kinerja		
	<p>a. Penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja harus di dasarkan pada data yang valid serta dapat diandalkan.</p>	<p>Terus melakukan perbaikan dokumen perencanaan sehingga informasi kinerja didasarkan pada data yang valid dan handal.</p>	<p>Melaksanakan Perubahan Renstra terhadap beberapa indikator agar lebih riil sehingga data yang disajikan valid dan handal.</p>
	<p>b. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja agar digunakan dalam perbaikan perencanaan sehingga berdampak kepada perbaikan perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan dan PK yang telah disusun</p>	<p>Melalui Perubahan Renstra dilakukan perubahan beberapa indikator maupun perubahan target. Hal ini tidak terlepas dari informasi kinerja tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai data dasar.</p>	<p>Berkoordinasi dengan bidang/UPTD agar menyampaikan data dukung yang valid untuk setiap indikator, dan digunakan sebagai base data dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya.</p>

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	c. Informasi yang disajikan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi sehingga dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur	Capacity Building khususnya terkait penilaian atas keberhasilan dan kegagalan program.	Melakukan analisis keberhasilan dan kegagalan berdasarkan informasi capaian kinerja yang disusun sebagai bukti pencapaian dan telah tertuang dalam laporan kinerja.
	d. Informasi yang disajikan digunakan untuk peningkatan capaian kinerja organisasi yang lebih baik dari periode berikutnya;	Berupaya meningkatkan capacity building khususnya terkait penilaian atas keberhasilan dan kegagalan program serta upaya perbaikan selanjutnya.	Melakukan rapat evaluasi capaian kinerja secara berkala terkait upaya perbaikan yang harus dilakukan pada periode selanjutnya.
4.	Evaluasi Internal		
	a. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi agar sepenuhnya dilakukan (dilakukan secara periodik tahunan);	Melaksanakan penganggaran kegiatan evaluasi secara berkala maupun yang sifatnya situasional.	Melaksanakan kegiatan evaluasi atas rencana aksi dan Rencana Kerja secara berkala.
	b. Agar meningkatkan kualitas evaluasi pemantauan rencana aksi yang dilakukan secara bulan kegiatan evaluasi dalam rangka pengendalian kinerja;	Merencanakan rapat evaluasi pemantauan lebih sering (perbulan) meskipun skala terbatas.	Melaksanakan rapat evaluasi lebih sering (perbulan) dari sebelumnya per triwulan/persemester.
	c. Agar meningkatkan penilaian evaluasi atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan memberikan alternative perbaikan;	Berupaya meningkatkan laporan hasil evaluasi dengan memberikan alternative perbaikan.	Menyusun formulir baku untuk setiap kegiatan evaluasi atas rencana aksi yang dilaksanakan.

NO	REKOMENDASI	TUNDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	d. Agar meningkatkan hasil evaluasi rencana aksi setiap periode sehingga menunjukkan perbaikan;	Berupaya untuk meningkatkan hasil evaluasi melalui peningkatan SDM aparat.	Mengisi formulir laporan evaluasi secara konsisten disertai petunjuk pengisian yang baik.
	e. Meningkatkan hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;	Berupaya untuk meningkatkan hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti.	Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan agar lebih maksimal di masa mendatang.
	f. Meningkatkan hasil evaluasi rencana aksi yang ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.	Berupaya untuk meningkatkan hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan langkah nyata.	Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan agar lebih maksimal di masa mendatang.
5.	Pencapaian Kinerja Organisasi		
	Agar dalam capaian informasi kinerja output maupun outcome agar lebih ditingkatkan lagi sehingga data yang diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid, sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, serta dapat diverifikasi dan up to date	Berupaya melakukan perbaikan atas indicator program melalui Perubahan Dokumen Perencanaan, sehingga diperoleh informasi kinerja yang valid dan sumber data yang kompeten.	Melakukan Perubahan Dokumen Perencanaan dengan indikator kinerja yang lebih riil merupakan hasil kinerja, sehingga informasi kinerja yang disajikan valid dari sumber data yang dipercaya.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dalam era globalisasi saat ini perkembangan industri dan perekonomian harus diimbangi oleh kinerja karyawan yang baik sehingga dapat tercipta dan tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia (pegawai) dalam organisasi adalah mengukur kinerja pegawai. Pengukuran kinerja dikatakan

penting mengingat melalui pengukuran kinerja ini dapat diketahui seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Ketepatan pegawai dalam menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja pegawai akan memberikan informasi penting dalam proses pengembangan pegawai.

Berikut ini disampaikan capaian kinerja per triwulan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan indikator sasaran yang ditetapkan :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja per Triwulan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	TARGET TW 1	TARGET TW 2	TARGET TW 3	TARGET TW 4	REALISASI SMP TW 4	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Persen	3,38%	0	0	0	3,38%	2,09%	61,83%
<i>Aktifitas Kegiatan : Pembinaan dan koordinasi</i>										
Rata-rata capaian indikator sasaran Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan										61,83%
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim	Persen	17,55%	0	0	0	17,55%	20,03%	114,13%
		Disparitas harga antar wilayah (<i>semakin kecil semakin baik</i>)	Persen	18%	0	0	0	18%	11,52%	156,25%
<i>Aktifitas Kegiatan : Pembinaan, koordinasi dan promosi, pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok, penting dan monitoring harga.</i>										
Rata-rata capaian indikator sasaran Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas										135,19%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	TARGET TW 1	TARGET TW 2	TARGET TW 3	TARGET TW 4	REALISASI SMP/TW 4	CAPAIAN (%)
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	54	0	0	0	54	52,57	97,35%
<i>Aktifitas Kegiatan : Koordinasi dan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok, penting dan monitoring harga.</i>										
Rata-rata capaian indikator sasaran Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen										97,35%
4	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	Triliun (Rp)	924	0	0	0	0	1,100	119,05%
		Nilai Omzet UKM	Triliun (Rp)	50	0	0	0	0	76,8	153,6%
<i>Aktifitas Kegiatan : Koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi dan UKM</i>										
Rata-rata capaian indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM										136,32%
Rata-rata keseluruhan capaian indikator sasaran :			107,67%							

C. Analisis Capaian Kinerja 2021

Capaian indikator pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2021 implementasinya mencakup pelaksanaan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dalam 14 (empat belas) program yang merupakan bagian dari 4 (empat) sasaran selama tahun 2021, maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

□ Sasaran I : Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara

Dengan Indikator : Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I pada tahun 2021 ini adalah 3,38%, dan realisasi tingkat capaian hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 2,09%, sehingga persentase pencapaian indikator I sebesar 62%.

□ Sasaran II : Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan Non Batubara

Dengan Indikator : 1. Presentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim
2. Disparitas Harga Antar Wilayah (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II (dua) pada tahun 2021 ini adalah untuk indikator Presentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim, ditetapkan targetnya sebesar 17,55% dan realisasi Presentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim sebesar 20,03%, sehingga persentase

pencapaian indikator sasarannya sebesar 114,13%. Sedangkan untuk indikator sasaran Disparitas Harga Antar Wilayah ditetapkan targetnya sebesar 18% dan realisasi capaian indikator sasaran Disparitas Harga Antar Wilayah sebesar 11,52%, sehingga persentase pencapaian indikator sasarannya sebesar 156,25%. Dimana presentasi perbedaan harga antar wilayah kab/kota *semakin kecil* maka pencapaian semakin baik.

□ Sasaran III : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.

Dengan Indikator : Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III (tiga) pada tahun 2021 adalah dengan nilai 54 dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh nilai 52,57, sehingga pencapaian indikator sasarannya sebesar 97,4%.

□ Sasaran IV : Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM

Dengan Indikator : 1. Nilai Omzet Koperasi
2. Nilai Omzet UKM

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV (empat) tahun 2021 adalah untuk indikator Nilai Omzet Koperasi sebesar 924 Miliar Rupiah dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh 1,1 Triliun Rupiah sehingga persentase pencapaian sasarannya sebesar 119%. Untuk indikator Nilai Omzet UKM sebesar 50 Triliun Rupiah dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 76,8 Triliun Rupiah, sehingga persentase pencapaian indikator sasarannya sebesar 153,6%.

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2021 dapat dikatakan sangat berhasil, baik dari sumber dana APBD untuk pembangunan sebanyak 14 (empat belas) program, maupun dari sumber dana APBN/Dana Dekonsentrasi sebanyak 4 (empat) program. Secara rinci pengukuran kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Persen	3,38	2,09	61,83
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim	Millar USD	17,55	20,03	114,13
		Disparitas harga antar wilayah (%) <i>(persentase semakin kecil semakin baik)</i>	Persen	18	11,52	156,25
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	54	52,57	97
4	Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	Millar (Rp)	924	1100	119
		Nilai Omzet UKM	Triliun (Rp)	50	76,8	153,6
Rata-rata keseluruhan capaian indikator sasaran :				107,67%		

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2021) dengan dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 dan tahun terakhir 2020;

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021, 2020 dan 2019.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan
			2019	2020	2021	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	$7 = (6-5) / 5 \cdot 100\%$
1	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	Persen	17,77	18,90	19,25	1,85
2	Nilai Ekspor Non Migas	US\$	14,11	11,83	17,36	46,75
3	Jumlah Koperasi Unggulan	Koperasi	16	34	48	41,18
4	UKM Unggulan	UKM	41	60	42	-30
Indikator Yang Mengacu Pada Perubahan Renstra 2019-2023						
1	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non belubara terhadap PDRB (%)	Persen	7,79	-1,43	2,09	246,15
2	Presentase Ekspor non migas dan non balubara terhadap total ekspor Kaltim	Persen	11,30	16,71	20,03	19,87
3	Disparitas harga Antar Wilayah (<i>persentase semakin kecil semakin baik</i>)	Persen	13,8	16,4	11,52	43,23
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	38,4	51,3	52,57	2,48
5	Nilai Omzet Koperasi	Miliar (Rp)	998	846	1.100	30,02
6	Nilai Omzet UKM	Triliun (Rp)	2,6	3,5	76,8	2.094

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2021) dengan target jangka menengah (s.d 2023) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target jangka Menengah s.d 2023.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
Indikator Yang Mengacu Pada Perubahan Renstra 2019-2023					
1	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	Persen	4,51	2,09	-2,42
2	Presentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim	Persen	18,97	20,03	1,06
3	Nilai Omzet Koperasi	Miliar (Rp)	943 M	1.100 M	157
4	Disparitas Harga Antar Wilayah <i>(presentase semakin kecil semakin baik)</i>	Persen	18	11,52	6,48
5	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Persen	54	52,57	-1,43
6	Nilai Omzet UKM	Triliun (Rp)	54 T	76,8 T	22,8

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini 2021 dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
			2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	Persen	18,90	7,97	19,25	-
2	Nilai Ekspor Non Migas	US\$ M	9,6	17,36	219,25	-
3	Koperasi Unggulan	Koperasi	43	48	-	-
4	UKM Unggulan	UKM	60	42	-	-
5	Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	Persen	14,76	15,13	5,1 (PDB Koperasi)	-
Indikator Yang Mengacu Pada Perubahan Renstra 2019-2023						
1	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Persen	-1,43	2,09	3,67	
2	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim	Persen	16,92	20,03	56,23	
3	Disparitas Harga antar Wilayah	Persen	16,40	11,52	5,642	Disparitas harga rata-rata Kaltim dibandingkan dengan Harga rata-rata Nasional
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	51,3	52,57	49,07	-
5	Nilai Omzet Koperasi	Miliar (Rp)	846	1.100	-	
6	Nilai Omzet UKM	Triliun (Rp)	3,5	76,8	-	

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- a. Sasaran 1 : Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB.

Pada triwulan III 2021 industri pengolahan mencatat pertumbuhan 2,22% (yoy), melambat setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 8,48% (yoy), diakhir tahun atau pada triwulan IV 2021 tercatat pertumbuhan industri pengolahan sebesar 2,29%, membaik dari tahun sebelumnya yang berkontraksi hingga 2,88%.

Industri pengolahan yang tumbuh melambat utamanya periode triwulan II ke triwulan III disebabkan oleh kinerja industri kimia (organik dan anorganik) yang menurun sejalan dengan serapan nasional yang juga menurun akibat pengelatan kembali mobilitas. Indeks produksi methanol di Kaltim tercatat mengalami kontraksi 7,00% (yoy) pada triwulan III 2021, setelah pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,94% (yoy). Sementara itu, kinerja ekspor bahan kimia organik Kaltim yang mayoritas berbahan dasar sawit juga mengalami pelemahan. Ekspor bahan kimia organik Kaltim pada triwulan III 2021 berkontraksi 26,84% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 13,03% (yoy).

Kinerja industri pengolahan Kaltim yang melambat juga didorong oleh harga komoditas CPO dan bahan kimia organik yang juga tumbuh melambat. Harga CPO internasional pada triwulan III 2021 mencapai 1,124.86 dolar AS per mt atau tumbuh 49,94% (yoy). Meskipun harga CPO terus mencatat rekor tertinggi, capaian harga tersebut tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 76,83% (yoy) didorong oleh produksi CPO Malaysia yang mulai membaik sejalan dengan kasus gelombang ketiga COVID-19 di negara tersebut yang mulai menurun. Sejalan dengan harga CPO, indeks harga ekspor bahan kimia organik (yang mayoritas merupakan turunan kelapa sawit) juga mengalami

perlambatan pertumbuhan dari 143,3% (yoy) pada triwulan II 2021, menjadi 109,8% (yoy) pada triwulan III 2021.

Perlambatan kinerja industri pengolahan yang lebih dalam tertahan oleh ekspor migas yang menguat. Volume ekspor migas Kaltim pada triwulan III 2021 berkontraksi 0,83% (yoy). Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 46,12% (yoy). Pada 2020, industri pengolahan migas merupakan sub sektor industri pengolahan yang memiliki pangsa terbesar, yaitu mencapai 56,4% terhadap total PDRB industri pengolahan di Kaltim. Perlambatan kinerja industri pengolahan yang lebih dalam juga tertahan oleh kinerja produksi dan harga pupuk yang tumbuh menguat. Indeks produksi pupuk di Kaltim pada triwulan III 2021 tercatat tumbuh sebesar 5,04% (yoy), menguat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,57% (yoy). Selain produksinya yang menguat, harga pupuk internasional juga berada dalam tren menguat. Harga Urea internasional pada triwulan III 2021 mencapai 435.71 dolar AS per mt atau tumbuh 82,97% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2021 yang tercatat 350.99 dolar AS per mt atau tumbuh 64,81% (yoy). Selain itu, indeks harga bahan kimia anorganik juga tumbuh membaik dari 143,4% (yoy) pada triwulan II 2021, menjadi 154,7% (yoy) pada triwulan III 2021.

Sasaran meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batubara 9,43%, sampai dengan triwulan ke IV 2021 realisasinya sebesar 7,97% (y-on-y), berarti pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 84,51%. Namun peran industri pengolahan migas masih dominan dalam komposisi kontribusi sektor industri terhadap PDRB, sekitar 55,25 % untuk migas, 44,75 % untuk non migas. Keadaan ini karena hilirisasi industri di Kalimantan Timur yang berbasis sumber daya alam renewable belum optimal, kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan dalam RTRW maupun kawasan industri yang telah mempunyai izin usaha kawasan industri belum berkembang/beroperasi secara maksimal.

b. Sasaran II : Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi Ekspor Non Migas.

Memiliki 2 indikator sasaran Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim dan Disparitas Harga Antar Wilayah, dimana Indikator sasaran Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim dengan realisasi sebesar 20,23% dari target tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 17,55% atau tercapai sebesar 115,27%. Tingginya capaian realisasi ekspor non migas dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditi CPO dunia. Harga referensi CPO pada awal Tahun 2021 sudah menunjukkan tren kenaikan harga sampai dengan akhir Tahun 2021. Pada Bulan Januari 2021 harga referensi CPO berkisar 951,86 US\$ dan mengalami kenaikan dibandingkan Harga CPO Bulan Desember 2020 sebesar 870,77 US\$. Sedangkan harga referensi CPO pada Bulan desember 2021 naik drastis sebesar 1.365,99 US\$.

Untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 20% dan realisasi capaian indikator sasaran sebesar 14%, sehingga persentase pencapaian indikator sasarnya sebesar 142,86% (persentase semakin kecil semakin baik). Sehingga dapat diindikasikan bahwa perbedaan harga barang kebutuhan pokok antar wilayah kabupaten/kota semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengendalikan harga dan stok bahan pokok melalui berbagai kebijakan berjalan dengan baik.

c. Sasaran III : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK).

Terjadinya peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) 51,30 pada tahun 2020 menjadi 52,57 poin tahun 2021. Hal ini tentunya dampak dari meningkatnya pengetahuan dan wawasan para konsumen di Kalimantan Timur, yang mana di tahun 2020 dilakukan

kegiatan Edukasi Konsumen Cerdas bagi pelajar SLTA dan ASN di 3 Kab/Kota sebanyak 600 konsumen.

Sedangkan tahun 2021 Edukasi Konsumen Cerdas bagi ASN dan Non ASN di 5 Kab/Kota sebanyak 921 konsumen. Selanjutnya juga dilaksanakan kegiatan pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di 10 Kab/Kota serta meningkatkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui penyelesaian mediasi berbagai pengaduan sengketa konsumen. Seterusnya terbukanya berbagai sumber informasi pemberdayaan konsumen melalui kegiatan talk show di TVRI, RRI dan Media Cetak (Koran).

- d. **Sasaran IV : Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi.**

Dengan 3 indikator sasaran yaitu Koperasi Unggulan, UKM Unggulan dan Sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB. Untuk indikator sasaran Koperasi Unggulan jumlah Koperasi Unggulan di Kalimantan Timur untuk tahun 2020 ini kondisinya menaik, dimana pencapaiannya sebesar 430%. Koperasi unggulan adalah koperasi berkualitas dengan omzet lebih dari 2 Miliar, anggota lebih dari 500 orang, asset diatas 1 Miliar, telah diaudit oleh auditor independen. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas sehat, SHU per anggota minimal 1X UMR.

Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan melalui berbagai pembinaan berupa berbagai pelatihan antara lain diklat akuntansi, manajemen kepada pengurus koperasi dan juga dengan dilakukannya pengawasan secara intensif terhadap kinerja koperasi yang ada.

Sedangkan untuk indikator sasaran UKM Unggulan dengan pencapaian mencapai 200%, mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya jumlah pelaku UKM dan peningkatan jumlah koperasi Kalimantan Timur, hal ini juga diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan investasi di

sektor Koperasi dan UKM. Hanya saja diperlukan peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pelaku UKM dan SDM koperasi dalam rangka menghadapi persaingan dalam era MEA yang dimulai tahun 2015.

Indikator sasaran Persentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UKM pada tahun 2020 mencapai 4,5%*, dengan pencapaian terhadap target yang ditetapkan 4,6% adalah 97,83%*. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, KUKM juga berperan dalam distribusi hasil-hasil pembangunan, mengingat jumlah usaha di Kalimantan Timur mencapai 307.238 unit dan sebagian besar 97,61% adalah KUKM.

Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi pada tahun 2020 sebanyak 20 orang dengan target 25 orang dan capaiannya adalah hanya 80%. Pencapaian kinerja tersebut terkendala dengan adanya aparat yang dilibatkan dalam diklat tersebut harus mendukung tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.

Jumlah sarana pelayanan publik pada tahun 2020 sebanyak 10 sarana dan pencapaian terhadap target sebesar 100%. Untuk pelayanan publik terus diupayakan agar kedepan ada penambahan sarana pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan ataupun memperbaiki sarana yang ada.

Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi pada tahun 2020 sebanyak 6 dokumen dengan target juga 6 dokumen, sehingga pencapaian terhadap targetnya mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan jenis dokumen baru yang dibutuhkan. - alternatif solusi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Sasaran I : Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang didalamnya terdapat kebijakan pembangunan industri untuk mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan, sebagaimana juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi daerah yang sesuai dengan kondisi daerah, kearifan lokal, potensi wilayah dan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan industri diarahkan pada pengolahan sumber daya alam terbarukan yang tersedia di Kalimantan Timur, komoditi unggulan Kalimantan Timur adalah sawit, karet, kayu, rumput laut, udang, ikan dan gas alam dalam industri unggulan hulu agro, aneka, kimia dasar dan pangan.

Untuk menunjang pembangunan industri diatas maka pada tahun 2021 bidang industri mempunyai 3 program yaitu :

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

b. Sasaran II : Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas.

Untuk menunjang sasaran diatas maka pada tahun 2021 Bidang Perdagangan mempunyai 3 Program, 4 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan yaitu :

1. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.

- a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor.
 - b. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Perdagangan.
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota.
 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan.
 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor.
3. PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
- a. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri.
 - Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi.

Beberapa upaya untuk pencapaian target indikator kinerja, yaitu :

1. Koordinasi dengan pelaku usaha, pihak terkait untuk mensinergikan kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting.

2. Mengoptimalkan forum kerjasama perdagangan dalam upaya keteroukupan pasokan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim dan upaya perluasan pasar komoditi / produk unggulan Kaltim.
3. Melakukan upaya stabilisasi harga melalui operasi pasar, monitoring harga dan stok bapokting dan pengembangan Sistem Informasi Perdagangan.
4. Mendorong peningkatan ekspor non migas non batubara melalui koordinasi dengan dengan semua stake holder terkait dalam bentuk mencarikan informasi peluang pasar ekspor, pengumpulan data komoditi potensial ekspor dan mendorong penciptaan dan pendataan eksportir dan calon eksportir baru.
5. Fasilitas akses pasar luar negeri dan dalam negeri melalui misi dagang, business matching, forum kerjasama perdagangan dan business matching dengan buyer luar negeri.
6. Menyediakan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri dalam rangka updating data harga barang kebutuhan pokok di seluruh pasar pantau di kabupaten/kota se Kaltim.
7. Melakukan upaya memasarkan produk ekspor non migas non batubara Kalimantan Timur melalui program misi dagang dan promosi/pameran di dalam dan luar negeri.
8. Melakukan upaya penyusunan program dan kegiatan yang mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas, yang berbasis primer kearah non migas non batubara (sumber daya terbarukan).
9. Pembinaan dan pendampingan eksportir dan calon eksportir dalam penumbuhan UKM eksportir di Kaltim melalui upaya sosialisasi Kebijakan Ekspor dan Impor, pendampingan langsung, fasilitasi permasalahan dan akses lainnya yang diperlukan eksportir dan calon eksportir.

10. Melakukan analisa terhadap isu-isu perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai upaya penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif.
11. Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh UKM.
12. Revitalisasi Pasar menuju Pasar Rakyat yang ber SNI serta Penataan Toko Swalayan untuk mendukung Stabilitas dan Ketersediaan Barang kebutuhan pokok bagi masyarakat.

c. Sasaran III : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen

Untuk menunjang meningkatkan indeks keberdayaan konsumen maka pada tahun 2021 bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang mempunyai 1 program ,3 sub kegiatan yaitu :

Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks Keberdayaan Konsumen yaitu :

- a. Peningkatan pembinaan kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha di beberapa Kabupaten/Kota melalui edukasi.
- b. Kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha mulai tumbuh akan pentingnya barang dan jasa yang sesuai ketentuan untuk diperdagangkan.
- c. Peningkatan pengawasan barang beredar dan/ atau jasa di seluruh Kabupaten/ Kota.

- d. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan konsumen untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa yang sesuai ketentuan.

d. Sasaran IV : Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi.

Untuk menunjang sasaran Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi maka pada tahun 2020 mempunyai 1 program dan 4 kegiatan yaitu :

1. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM.
 - Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi
 - Pembinaan Lembaga Koperasi dan UKM
 - Produksi Pembiayaan dan Pemasaran
 - Pengawasan Koperasi

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencapai target sasaran tersebut adalah :

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik di level provinsi maupun kabupaten / kota tentang pembagian kewenangan pembinaan koperasi dan UKM. Selain itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten / kota dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten / kota.
- Meningkatkan usaha pendampingan yang dilakukan Klinik Bisnis Koperasi dan UKM yang didukung oleh para pendamping untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk baik secara online maupun offline.
- Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dan aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan

pembiayaannya. Selain itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan classbusiness yang diikuti oleh para pelaku UKM untuk pemahaman UMKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha, pemasaran, dll.

- Memfasilitasi dan mendorong UKM untuk meningkatkan kualitas produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UKM ikut pameran, fasilitasi pemasaran ke retail modern serta pengurusan ijin usaha (IUMK, PIRT, Halal dll)
- Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat / bimtek pendamping, mengikutsertakan beberapa pendamping dalam program / kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif dengan dinas kabupaten / kota untuk menghindari adanya kesalahan dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif. Selain itu data keragaan koperasi dan data per jenis koperasi yang dientry dalam Online Data System (ODS) agar dilakukan updating secara berkala oleh Tim Data Kabupaten / Kota.
- Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi aktif yang belum melakukan RAT dalam bentuk pendampingan untuk segera melakukan RAT dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagai bukti bahwa koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang aktif melakukan RAT.
- Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau dari aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan beberapa stake holder dalam mengoptimalkan program kemitraan antara pengusaha besar dengan UKM dan koperasi. Kemitraan yang diberikan oleh perusahaan besar melalui pola CSR atau kemitraan

dalam melakukan usaha seperti koperasi perkebunan dengan perusahaan kelapa sawit.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terlampir disampaikan tingkat efisiensi atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran, dimana terdapat 6 (enam) indikator dengan capaian rata-rata diatas 80%. Adapun tingkat efisiensi tertinggi pada indikator Nilai Omzet UKM dengan tingkat efisiensi mencapai 153,6% sedangkan tingkat efisiensi terendah pada indikator Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara Terhadap PDRB, yaitu minus 13,02%.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	62	53,43	8,57
2	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan Non Batubara	Presentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim	114,13	72,69	41,44
		Disparitas Harga Antar Wilayah	156,32	72,39	83,93
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	97,4	83,69	13,71
4	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	119	85,53	50,79
		Nilai Omzet UKM	153,6		

Tabel 3.8. Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Persen tase	Total APBD Non Gaji		Jumlah Program/Kegiatan yang Dialokasikan		Total Program/ Kegiatan		Ket
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019	50,424,740,716	43,020,234,676	7.404.506.040	85,32	18,464,459,716	3,280,300,000	21	37	21	37	
2020	43,879,403,822	36,859,047,285,80	7.020.356.536,2	84,01	18.294.032.000	9.581.507.000	21	34	21	34	
2021	55,887,255,626	45,805,402,760	10,081,852,866	81,96	17.947.708.094	2.044.000.004	14	32	14	32	

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran (Rp)			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian %	
1	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	3,38	2,09	62	5.600.000.000	2.991.849.796	53,43	
2	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan Non Batubara	17,55	20,03	114,13	2.800.000.000	2.112.911.188	75,46	
		18	11,52	156,25				
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	54	52,57	97,35	2.750.000.000	1.910.309.873	69,47	
4	Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	924	1100	119	5.887.679.890	5.035.714.241	85,53	
		50	76,8	153,6				

2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KET.
		ALOKASI	REALISASI	%	
SEKRETARIAT					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.849.575.736	26.577.953.458		
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.400.000.000	1.196.780.066	85,48	
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.296.371.894	17.112.631.200	84,31	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	745.682.000	703.174.100	94,30	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KET.
		ALOKASI	REALISASI	%	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.804.726.151	3.685.577.250	96,87	
	- Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.126.620.000	1.586.453.000	74,60	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.427.862.895	1.286.207.566	90,08	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.048.312.796	1.007.130.276	96,07	
KOPERASI					
2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	500.000.000	498.688.330		
	- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000.000	498.688.330	99,74	
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	3.387.679.890	2.937.321.743		
	- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.387.679.890	2.937.321.743	86,71	
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	500.000.000	436.292.550		
	- Pemberdayaan Usah Kecil Yang Dilakukan Melalui Pedataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	500.000.000	436.292.550	87,26	
5.	Program Pengembangan UMKM	500.000.000	498.824.200		
	- Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	500.000.000	498.824.200	99,76	
INDUSTRI					
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.000.000.000	587.368.100		
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2.000.000.000	587.368.100	29,37	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KET.
		ALOKASI	REALISASI	%	
7.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	3.000.000.000	2.125.162.598		
	- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	3.000.000.000	2.125.162.598	70,84	
8.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	600.000.000	279.319.098		
	- Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPU, IUKI, Dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	600.000.000	279.319.093	46,55	
PERDAGANGAN					
9.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.000.000.000	804.476.650		
	- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Provinsi	1.000.000.000	804.476.650	80,45	
10.	Program Pengembangan Ekspor	1.000.000.000	682.531.738		
	- Koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	1.000.000.000	682.531.738	68,25	
11.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	800.000.000	625.899.800		
	- Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	800.000.000	625.899.800	78,24	
PERDAGANGAN – PKPB					
12.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	2.750.000.000	1.910.309.873		
	- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.885.000.000	1.353.854.913	71,82	
	- Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	865.000.000	556.454.960	64,33	
UPTD. BPSMB					
13.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.385.202.372	2.201.809.735		
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.282.854.928	1.240.430.296	96,69	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.100.000	109.488.708	99,44	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KET.
		ALOKASI	REALISASI	%	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.558.232	174.964.420	92,30	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	612.692.860	506.272.596	82,63	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.996.352	170.653.715	89,82	
14.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	2.114.797.628	1.955.135.985		
	- Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	2.114.797.628	1.955.135.985	96,44	
UPTD. Pelatihan Koperasi & UKM					
15.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.500.000.000	3.019.718.848		
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.668.715.000	1.639.828.652	98,27	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	178.440.912	89,22	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.785.000	102.177.590	83,22	
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000.000	325.420.725	65,08	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.500.000	113.055.797	56,11	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	807.000.000	660.794.808	81,88	
16.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.000.000.000	664.587.318		
	- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.000.000.000	664.587.318	66,46	
JUMLAH		55.887.255.626	45.805.402.760	81,96.	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021. LKj-IP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 ini dibuat sebagai Perjanjian Kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. LKj-IP Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LKj-IP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dapat dikategorikan berhasil, walaupun terdapat beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan yang

disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dampak Covid-19. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur maupun Kab/Kota, Dinas/Instansi terkait, Dunia Usaha dan Sekretariat Daerah Provinsi yang dengan kerjasama dan sinkronisasi programnya turut memberikan kontribusi.

- Ditinjau dari pencapaian sasaran strategis, juga dapat dikategorikan berhasil, dimana dari 4 (empat) sasaran dengan 6 indikator yang telah ditetapkan, 4 (empat) diantaranya diatas 100 (seratus) dan 1 (satu) lainnya diatas 90 (sembilan puluh) dan 1 (satu) indikator dengan persen dengan nilai diatas 60 (enam puluh). Keadaan ini semakin memacu kita untuk bekerja lebih keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin komplek.

Dengan laporan LKj-IP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.